

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH PENDUDUK, DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL SEBAGAI FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: 5 PROVINSI PULAU SUMATERA)



Skripsi Oleh:

**HARTA SINTA** 

(01021281823045)

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI TAHUN 2022

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH PENDUDUK, DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL SEBAGAI FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: 5 PROVINSI PULAU SUMATERA)

Disusun Oleh:

Nama : Harta Sinta

NIM : 01021281823045

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

**Dosen Pembimbing** 

Tanggal: 10 — 11 — 12

Ketua: Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si

NIP. 196805181993031003

Tanggal: 8 November 2022

Anggota: Dr. Hj. Ånna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 196805181993031003

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH PENDUDUK, DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL SEBAGAI FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: 5 PROVINSI PULAU SUMATERA)

Disusun oleh

FAKULTAS EKONOMI UNSRI .

Nama : Harta Sinta

NIM : 01021281823045

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 22 Desember 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif Indralaya, 09 Januari 2023

Ketua Anggota

r. H. Azwardi, S.E., M.Si Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 196805181993031003 NIP. 197007162008012015

Feny Marissa, S.E., M.Si NIP. 199004072018032001

Anggota

Mengetahui, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

### SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Harta Sinta

NIM : 01021281823045

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Desentralisasi Fiskal Sebagai Faktor Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: 5 Provinsi Pulau Sumatera)

Pembimbing:

Ketua : Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si

Anggota : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Tanggal Ujian: 22 Desember 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian permyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 09 Januari 2023 Pembuat Pernyataan



Harta Sinta NIM. 01021281823045 **KATA PENGANTAR** 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Indeks Pembangunan Manusia,

Jumlah Penduduk, dan Derajat Desentralisasi Fiskal Sebagai Faktor Pertumbuhan

Ekonomi Daerah (Studi Kasus: 5 Provinsi Pulau Sumatera)" sebagai salah satu

syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana pengaruh faktor Indeks

Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Derajat Desentralisasi Fiskal

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: 5 Provinsi Pulau Sumatera)

selama 2010-2020. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih

banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan

pada masa mendatang. Selain itu, penulis pun mengharapkan semoga skripsi ini

memiliki manfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 20 Desember 2022

Harta Sinta

NIM. 01021281823045

٧

**UCAPAN TERIMA KASIH** 

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai

kendala. Kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan

dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Saidi dan Ibu Aryanah selaku kedua orang tua saya serta saudaraku

Septi Ardina, Adi Wirayuda, dan Fadil Raafi Waliqram yang selalu

memberikan dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada henti-hentinya

selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E.,

M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga,

dan ilmu-ilmunya untuk dapat membimbing serta memberikan saran dalam

menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan

kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Teman-teman, administrasi Jurusan Ekonomi Pembangunan, dan semua

pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat

disebutkan satu per satu.

Indralaya, 20 Desember 2022

Harta Sinta

NIM. 01021281823045

vi

### **ABSTRAK**

### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH PENDUDUK, DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL SEBAGAI FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: 5 PROVINSI PULAU SUMATERA)

### Oleh:

Harta Sinta; Azwardi; Anna Yulianita

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan perekonomian dan kesejahteraan suatu negara bahkan dalam lingkup wilayah. Keadaan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup negara maupun wilayah memungkinkan untuk terus berubah di setiap tahunnya karena disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan wilayah studi 5 provinsi Pulau Sumatera selama 2010-2020. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan jumlah penduduk dan derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi Pulau Sumatera dalam periode 11 tahun tersebut. Disarankan kepada pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam pengoptimalan kualitas manusia dan memperbaiki strategi dalam mengelola keuangan daerah.

**Kata Kunci**: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Derajat Desentralisasi Fiskal

Ketua

Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si

NIP. 196805181993031003

Anggota

Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

### ABSTRACT

### HUMAN DEVELOPMENT INDEX, POPULATION, AND DEGREE OF FISCAL DECENTRALIZATION AS FACTORS OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH (CASE STUDY: 5 PROVINCES OF SUMATRA **ISLAND**)

By:

### Harta Sinta; Azwardi; Anna Yulianita

Economic growth is one of the benchmarks that can be used to see the economic capabilities and welfare of a country even within the scope of the region. The state of economic growth within the scope of countries and regions makes it possible to continue to change every year due to various factors. This study aims to analyze the influence of human development index factors, population, and the degree of fiscal decentralization on regional economic growth with a study area of 5 Sumatra Island provinces during 2010-2020. In this study, a quantitative descriptive analysis method was used with panel data regression analysis techniques. The results showed that the human development index had a significant effect on economic growth while the population and degree of fiscal decentralization did not have a significant influence on economic growth in the 5 provinces of Sumatra Island in the 11-year period. It is recommended that local governments can take more effective policies in increasing economic growth, especially in optimizing human quality and improving strategies in managing regional finances.

**Keywords:** Economic Growth, Human Development Index, Population, Degree of Fiscal Decentralization

Chairman

NIP. 196805181993031003

Member

Dr. Hj. Anna Yulianita. NIP. 197007162008012015

Knowing.

Head of the Development Economics Department

Dr. Mukhlis S.E., M.Si NIP. 197304062010121001

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama Harta Sinta					
	NIM	01021281823045				
	Tempat, Tanggal Lahir	Banyuasin, 05 Oktober 1999				
	Alamat	Jl. Trans Pulau Rimau, Desa Meranti, Kec. Suak Tapeh, Kab. Banyuasin				
	Nomor Handphone	085383897667				
Agama	Islam					
Jenis Kelamin	Perempuan					
Status	Belum Menikah					
Kewarganegaraan	Indonesia					
Tinggi	165 cm					
Berat Badan	57 kg					
Email	Email sintaharta510@gmail.com					
PENDIDIKAN FORMAL						
2005 – 2011	SD Negeri 12 Suak Tapeh					
2011 – 2014	SMP Negeri 1 Suak Tapeh					
2014 - 2017	SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III					
2018 – 2022	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya					
RIWAYAT ORGANISASI						
2018 – 2019	Anggota Departemen Syiar BO Ukhuwah Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya					
PENGALAMAN PENGABDIAN DAN PENELITIAN						
2022	Panitia Kegiatan Pengabdian Berjudul "Pemberdayaan SDM Melalui Pelatihan Usaha dan Keterampilan Berbasis Kearifan Lokal" diselenggarakan oleh LP2M Universitas Sriwijaya					
2022	Anggota Penelitian Berjudul "Determinants of Indonesia's Coffee Commodity with Trading Partner Countries" diterbitkan pada Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) 2022					

### **DAFTAR ISI**

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
	_
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	
2.1.2 Teori Kesejahteraan	16
2.1.3 Decentralization Theorem	
2.2 Konsep dan Definisi	18
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	18
2.2.2 Jumlah Penduduk	19
2.2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal	
2.3 Penelitian Terdahulu	
2.4 Kerangka Pemikiran	26
2.5 Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	
3.2 Jenis dan Sumber Data	
3.3 Metode Pengumpulan Data	
3.4 Teknik Analisis	
3.4.1 Pengestimasian Model Regresi Data Panel	
3.4.2 Uji Spesifikasi Model	
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	
3.4.4 Uji Signifikansi	
3.5 Definisi Operasional Variabel	
3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi	42

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera 2016-2020	3
Gambar 1.2 IPM 5 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2016-2020	6
Gambar 1.3 Rasio DDF Kelima Provinsi di Pulau Sumatera dalam Periode 5	
Tahun (2016-2020)	9
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	28
Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh	45
Gambar 4.2 Peta Provinsi Riau	46
Gambar 4.3 Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
Gambar 4.4 Peta Provinsi Lampung	49
Gambar 4.5 Peta Provinsi Kepulauan Riau	50
Gambar 4.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kelima Provinsi Pulau	
Sumatera	53
Gambar 4.7 Indeks Pembangunan Manusia 5 Provinsi di Pulau Sumatera	58
Gambar 4.8 Pengeluaran Perkapita yang Dikeluarkan di 5 Provinsi Pulau	
Sumatera	66
Gambar 4.9 Pertumbuhan Penduduk 5 Provinsi di Pulau Sumatera	71
Gambar 4.10 Derajat Desentralisasi Fiskal Kelima Provinsi Pulau Sumatera	74
Gambar 4.11 Pertumbuhan Derajat Desentralisasi Fiskal Kelima Provinsi Pula	u
Sumatera	77
Gambar 4.12 Hasil Uji Normalitas	87

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 5 Provinsi di Pulau Sumatera	4
Tabel 4.1 Umur Harapan Hidup dan Perkembangannya di 5 Provinsi	Pulau
Sumatera	61
Tabel 4.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di 5 Provinsi	Pulau
Sumatera	64
Tabel 4.3 Jumlah dan Pertambahan Penduduk 5 Provinsi Pulau Sumatera	70
Tabel 4.4 Hasil Estimasi CEM, FEM, dan REM	79
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	81
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	81
Tabel 4.7 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)	82
Tabel 4.8 Hasil Random Effect Model (Model Terpilih)	83
Tabel 4.9 Hasil Intersep Random Effect Model	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	87
Tabel 4.11 Hasil Regresi dengan Uji Heteroskedastisitas	88
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas	89
Tabel 4.13 Hasil Uji F Statistik	89
Tabel 4.14 Hasil Uji-t Statistik	90
Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi	92

### BAB I

### PENDAHULUAN

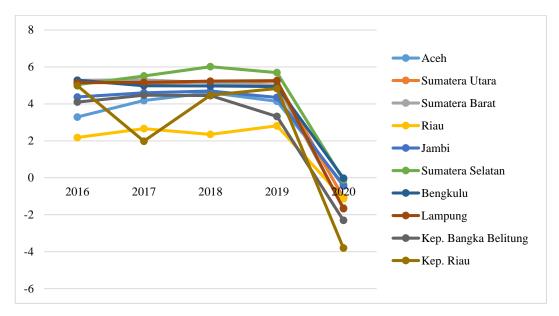
### 1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang yang umumnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan terutama dibidang perekonomian. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan perekonomian suatu negara yaitu dari aspek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan sebagai indikator untuk menganalisa kinerja perekonomian dalam upaya membangun jalannya aktivitas ekonomi suatu bangsa (Utami, 2020). Proses yang ditandai dengan terjadinya peningkatan jumlah penghasilan masyarakat (meliputi hasil produksi barang dan jasa) suatu negara dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, termasuk di dalamnya terdapat upaya untuk membenahi berbagai bidang pada sistem kelembagaan disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya membangun sangat mengharapkan kondisi pertumbuhan ekonomi berada pada angka yang stabil karena dalam keadaan tersebut berbagai masalah-masalah perekonomian dapat teratasi (Asnidar, 2018).

Dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami keadaan yang agak berfluktuatif dan relatif menurun di tahuntahun terakhir. Pada tahun 2016 sampai 2018 angka pertumbuhan yang dicapai berada pada kisaran 5 persen dengan kondisi sedikit meningkat yaitu dari 5, 03 persen menjadi 5, 17 persen. Namun di tahun 2019 mulai terjadi penurunan sebesar

0, 15 persen. Kemudian pada tahun selanjutnya penurunan masih berlanjut yang bahkan menyumbangkan nilai *minus*. Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan bahwa terjadinya kontraksi sebesar 2,07 persen menekan pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang jauh merosot dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi kemerosotan ini dikarenakan adanya dampak dari faktor resesi ekonomi dunia akibat serangan virus *Covid-19* yang juga banyak berimbas pada berbagai bidang. Selain itu, secara spasial struktur perekonomian Indonesia yang dapat ditinjau dari penyumbang kontribusi terhadap PDB Indonesia sebagian besar masih dikuasai oleh provinsi yang berasal dari Pulau Jawa.

Jika dilihat dari aspek kewilayahan, setiap provinsi di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Dengan jumlah provinsi yang terbilang cukup banyak, masing-masingnya pun memiliki kapasitas dan kebutuhan yang beragam pula. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia merupakan wujud dari bervariasinya potensi alam dan kualitas sumber daya manusia serta peran teknologi yang ada di setiap daerah (Umiyati, 2014). Kelompok provinsi di Pulau Sumatera termasuk ke dalam salah satu wilayah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah di tingkat nasional walaupun menjadi wilayah dominan penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar setelah Pulau Jawa. Laju pertumbuhan masing-masing provinsi pun tergolong berfluktuatif seperti yang telihat pada Grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2016-2020

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera 2016-2020

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dalam periode waktu 5 tahun tingkat pertumbuhan sepuluh provinsi secara umum berada dalam posisi yang tidak konstan. Di tahun terakhir (2020) terjadi penurunan secara signifikan dan bahkan ada yang mencapai nilai negatif. Rata-rata pertumbuhan selama 2016-2020 sebesar 2 sampai 4 persen. Pada kenyataannya, wilayah Pulau Sumatera memiliki potensi dalam pengembangan perolehan hasil bumi dan lumbung energi seperti hasil batubara dan pertambangan sekaligus menjadi pusat produksi karet dan kelapa sawit. Namun, potensi tersebut belum dapat mendukung sepenuhnya kemajuan bidang ekonomi khususnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017). Diantara kesepuluh anggota provinsi, terdapat 5 provinsi yang menduduki posisi pertumbuhan ekonomi terendah di pulau tersebut bahkan tergolong separuh terendah dalam cakupan nasional. Tabel berikut memperlihatkan kelima provinsi tersebut.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 5 Provinsi di Pulau Sumatera

Tahun	Provinsi				
	Aceh	Riau	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
2016	3.29	2.18	5.14	4.10	4.98
2017	4.18	2.66	5.16	4.47	1.98
2018	4.61	2.35	5.23	4.45	4.47
2019	4.14	2.81	5.26	3.32	4.83
2020	-0.37	-1.13	-1.67	-2.30	-3.80
Rata-rata	3.17	1.77	3.82	2.81	2.49

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2020

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa 5 provinsi dengan rata-rata tingkat pertumbuhan terendah selama tahun 2016 sampai 2020 yakni terdiri dari Provinsi Aceh, Riau, Lampung, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau. Besaran nilai persentase laju pertumbuhan hanya memiliki capaian di bawah 4 persen. Dalam kurun waktu lima tahun, masing-masing provinsi mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuatif dan menuju pada kondisi penurunan. Angka pertumbuhan tersebut pun masih dibawah target yang ingin dituju pemerintah provinsi setempat dan juga belum menggapai target nasional. Kondisi yang terjadi tidak terlepas dari berbagai faktor yang menjadi penyebabnya.

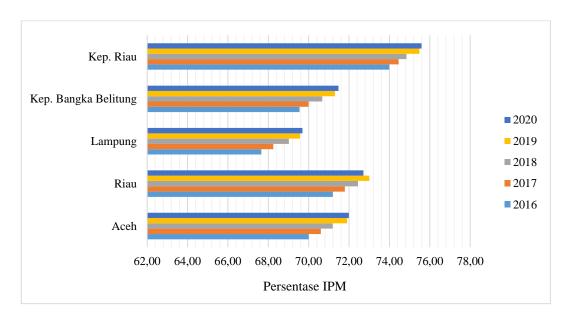
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2017) menyebutkan bahwa yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Sumatera diantaranya yaitu berasal dari masalah kondisi jalan, jumlah pelabuhan, proses perizinan dari pemegang kekuasaan setempat serta di beberapa provinsi masih perlu adanya perbaikan dan pemberdayaan bagi kualitas sumber daya manusia. Namun sebaliknya, terdapat juga faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya

di wilayah tersebut yaitu berasal dari indikator pembangunan manusia berdasarkan kualitas SDM serta kuantitas penduduknya (Saputra & Mahmudi, 2012).

Sebagai salah satu aspek yang mendorong serta dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat terlepas dari berbagai bidang dalam kehidupan terutama terhadap pembangunan negara. Tingkat kualitas SDM pun berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Taraf kesejahteraan di masyarakat dapat ditingkatkan melalui kualitas pembangunan karena cikal bakal penggerak pembangunan adalah manusia itu sendiri atau masyarakat (Alkhoiriyah & Sa'roni, 2021). Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan guna mencapai kehidupan yang sejahtera harus dapat mengoptimalkan secara maksimum kemampuan dan potensi sumber daya manusia. Negara yang sejahtera berasal dari kondisi masyarakatnya yang juga sejahtera.

Berbicara mengenai kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukurnya yakni dari indeks pembangunan manusia (IPM). Poin-poin utama dari IPM berupa usia penduduk, kemampuan dan pengetahuan yang ditinjau dari melek aksara dan rata-rata tingkat pendidikan, tingkat kelayakan hidup yang diukur dari PDRB per kepala berdasarkan standar daya beli masyarakat dengan masing-masing poin tersebut merupakan gabungan dari elemen dasar pembangunan manusia (Asnidar, 2018). Adanya kesinambungan dari berbagai bidang (SDM dengan kualitas dan aktivitas ekonominya) akan membentuk manusia yang unggul yang kemudian dapat menggerakkan roda perekonomian dan mengantarkan pada tercapainya kesejahteraan. Artinya, tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM)

dan kesejahteraan yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia dapat berperan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Wididarma & Jember (2021) memperoleh hasil bahwa jika capaian indeks pembangunan manusia dalam skala yang tinggi maka tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pun akan mengalami peningkatan. Di wilayah Pulau Sumatera secara umum kualitas IPM nya terus berkembang, tak terkecuali pada kelima provinsi seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2016-2020

Gambar 1.2 IPM 5 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020

Gambar 1.2 memperlihatkan tingkat IPM di lima provinsi dari waktu ke waktu yang konsisten mengalami peningkatan selama periode 5 tahun. Tingkat IPM tertinggi dari kelima provinsi tersebut dimiliki oleh Kep. Riau dengan capaian angka rata-rata 74, 87 persen. Sebaliknya pada tingkat IPM terendah berasal dari Provinsi Lampung dengan angka rata-rata 68, 84 persen. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2017) bahwa angka kesempatan

hidup dan tingkat hidup layak serta angka pendidikan yang cukup tinggi menjadi faktor yang membuat Kep. Riau berada pada posisi tertinggi dalam membangun kualitas SDM. Sementara itu, berbeda dengan Provinsi Lampung yang menduduki tempat paling bawah pada tingkat kapasitas pembangunan manusia diantaranya disebabkan oleh angka harapan hidup yang masih rendah dan terdapat daerah-daerah terisolir dengan akses terbatas yang berimbas pada rendahnya tingkat pendidikan. Secara keseluruhan, kondisi IPM di provinsi-provinsi tersebut telah mendefinisikan bahwa kualitas sumber daya manusianya telah berkembang dan mulai menempuh kemajuan.

Selanjutnya, yang menjadi bagian dari faktor pendukung tumbuhnya perekonomian dalam suatu wilayah yakni kuantitas atau jumlah penduduk. Aspek jumlah penduduk perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh pada berbagai bidang. Dalam kehidupan ekonomi, jumlah penduduk berkontribusi cukup penting karena aktivitas ekonomi dapat berkembang secara terus menerus yang diwujudkan melalui banyaknya jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk semestinya dapat meningkatkan hasil produksi dengan kuantitas yang cukup melimpah serta dapat mendatangkan para konsumen (Darma, 2021). Di dalam kegiatan perekonomian diperlukan efisiensi dari penduduk di suatu wilayah tersebut. Kondisi ini diwujudkan melalui penduduk yang bertindak sebagai tenaga kerja yang terkategori produktif sehingga dapat menghasilkan jumlah produksi atau output yang melimpah. Konsumen mendapatkan kebutuhan yang diinginkan sehingga berdampak pada keberlanjutan dalam kegiatan perekonomian yang terus berjalan dan nantinya akan berlanjut pada berlangsungnya proses pembangunan (Arifin &

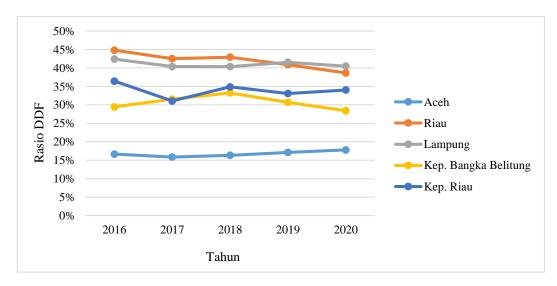
Fadllan, 2021). Semakin banyak jumlah penduduk yang berkualitas maka dapat mempercepat aktivitas ekonomi untuk bertumbuh.

Jumlah penduduk di Pulau Sumatera terkategori dalam jumlah yang tidak terlalu padat dan masih lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa. Dalam jangka waktu 5 tahun, jika dilihat dari lima provinsi yang tergabung di pulau tersebut, jumlah penduduk terbanyak berasal dari Lampung yakni sekitar 8.205.000 jiwa saat tahun 2016 yang kemudian meningkat menjadi 9.008.000 jiwa pada 2020. Sementara, untuk provinsi dengan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kep. Bangka Belitung dengan total kurang lebih 1.402.000 jiwa pada 2016 dan sedikit bertambah namun tetap konsisten pada angka 1 juta di tahun 2020 yakni sebesar 1.456.000 jiwa. Dalam hal ini, setiap tahunnya jumlah penduduk di wilayah tersebut terus menerus bertambah yang justru berbanding terbalik dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terkait dengan tren yang berfluktuatif bahkan terjadi penurunan sampai di akhir periode.

Selain IPM dan kuantitas penduduk yang berperan terhadap proses tumbuhnya perekonomian, Dinarjito & Dharmazi (2020) mengatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal termasuk salah satu faktor yang juga dapat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Para ahli ekonom yang sebagiannya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi, kemakmuran masyarakat, penanggulangan ketimpangan, dan peningkatan kapasitas layanan publik dapat didorong oleh wujud desentralisasi fiskal (Saputra & Mahmudi, 2012). Kekuasaan yang dipegang oleh suatu daerah dapat berkontribusi pada perekonomian dengan memanfaatkan kekayaan daerah setempat. Pemerintah daerah memerlukan bekal dana yang

bersumber dari kekayaan asli daerah serta yang berasal dari pemerintah pusat yakni dana perimbangan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian (Datu *et al.*, 2021). Dengan adanya wewenang secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan mewujudkan peran alokasi dari penerapan prioritas pembangunan yang diselenggarakan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Setiap daerah di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Sumatera tentunya diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara otonom potensi yang terdapat di daerah masing-masing. Kewenangan ini dapat menciptakan tingkat kemandirian di setiap daerah yang diukur dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). DDF merupakan perbandingan dari hasil Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penerimaan daerah. Grafik berikut menggambarkan tingkat DDF di 5 provinsi tersebut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2016-2020

Gambar 1.3 Rasio DDF Kelima Provinsi di Pulau Sumatera dalam Periode 5 Tahun (2016-2020)

Dilihat dari Gambar 1.3, selama 2016 sampai 2020 derajat desentralisasi fiskal di kelima provinsi Pulau Sumatera secara umum mengalami tren yang agak berfluktuatif. Tingkat DDF yang masuk ke dalam kategori kurang yakni dari Aceh dengan rerata 17 persen. Untuk kategori sedang terdapat 2 provinsi yaitu Kep. Babel dengan rerata 31 persen dan Kep. Riau sebesar 34 persen. Pada kategori yang sudah tergolong baik dipegang oleh Riau dan Lampung yang mencapai rerata masingmasing 42 persen dan 41 persen.

Dapat ditinjau dari kondisi DDF kelima provinsi dalam waktu 5 tahun terakhir ini telah mencakup kategori yang bervariatif (kurang, sedang, dan baik). Selain itu, berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa dari segi pembangunan manusia pada lima provinsi studi sudah mengalami peningkatan dan tergolong berhasil dalam membangun SDM yang bermutu serta dari indikator jumlah penduduk, provinsi-provinsi tersebut terus mengalami penambahan populasi dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari ketiga faktor tersebut yang bertindak sebagai variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini, terutama dari kondisi IPM dan kuantitas penduduk telah tergolong dalam keadaan yang baik. Namun, mengenai keadaan variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi justru berada dalam ketidakstabilan dan bahkan mengalami penurunan. Dengan demikian, terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh antara ketiga faktor yang dijadikan varibel bebas dengan variabel terikatnya yakni pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi Pulau Sumatera selama 11 tahun masa penelitian (2010-2020).

### 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat diangkat perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pengaruh faktor Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: 5 provinsi di Pulau Sumatera) tahun 2010 hingga 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari perumusan masalahnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh faktor indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi kasus: 5 provinsi di Pulau Sumatera) tahun 2010 hingga 2020.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terkategori menjadi dua manfaat yakni:

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh lembaga akademik seperti dosen ataupun mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan mengenai peran pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperdalam pembahasan terkait dengan teori dan konsep yang berhubungan dengan bidang ilmu ekonomi dan keuangan daerah yang mencakup di dalamnya mengenai tata

pengelolaan aset dan potensi daerah yang berkontribusi untuk menumbuhkan perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan.

### 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan khususnya yang berhubungan dengan topik yang dikaji.
- b. Bagi Pemerintah Derah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, penelitian ini bisa dipergunakan menjadi acuan untuk melihat kondisi dari indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk setempat, dan tingkat derajat desentralisasi fiskal (kemandirian fiskal) yang dicapai oleh provinsi-provinsi terkait. Dengan demikian, nantinya pemerintah daerah di Pulau Sumatera dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai dalam rangka mengoptimalkan dan memperbaiki kondisi yang berkaitan dengan peran dari kemampuan dan kualitas SDM serta tingkat kemandirian daerah masing-masing.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan informasi guna menambah pengetahuan serta bahan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, & Sufriadi. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 4(2), 71–79. https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133
- Alkhoiriyah, & Sa'roni. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 299–309.
- Apriesa, & Miyasto. (2013). Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–12. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1916
- Arifin, & Fadllan. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 38–59. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.4555
- Arikunto. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asnidar. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi*, 2(1), 1–12.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung. (2018). Tentang Provinsi Lampung. Retrieved July 9, 2022, from bpkp.go.id website: https://www.bpkp.go.id/lampung/konten/131/
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2017). Sinkronisasi Program Dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR. In *Https://Bpiw.Pu.Go.Id.* Retrieved from https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buku\_1Sumatera.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. *Www.Bps.Go.Id*, (13), 12. Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html
- Bahadur. (2019). Impact of Over-Population on Economic Growth and Development in India. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 6(1), 48–57.
- BPS Provinsi Aceh. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2015. In Berita Resmi

- Statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). *Analisis Profil Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkal Pinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020 Provinsi Kepulauan Riau*. Badan Stastistik Provinsi Kepulauan Riau.
- BPS Provinsi Lampung. (2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2020. In *Berita Resmi Statistik*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- BPS Provinsi Lampung. (2022). *Analisis Profil Penduduk Provinsi Lampung* (*Peran Penduduk dalam Pembangunan Daerah*). Retrieved from https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk.html
- BPS Provinsi Riau. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Riau Tahun 2015. In *Berita Resmi Statistik*. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- BPS Provinsi Riau. (2022). Analisis Profil Penduduk Riau (Dinamika, Peluang, dan Tantangan Menghadapi Pembangunan). Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Chygryn, Petrushenko, Vysochyna, & Vorontsova. (2018). Assessment of Fiscal Decentralization Influence on Social and Economic Development. *Montenegrin Journal of Economics*, 14(4), 69–84. https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-4.5
- Dao. (2012). Population and Economic Growth in Developing Countries. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(1), 6–17.
- Darma. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020. *Citra Ekonomi*, 2(1), 86–92.
- Darma, & Wulansari. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2020. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), 444–447. https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.309
- Datu, Engka, & Rorong. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1447–1454.
- Dinarjito, & Dharmazi. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 57–72. https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau. (2022). Profil Singkat Provinsi Kepulauan Riau. Retrieved July 9, 2022, from kepriprov.go.id

- website: https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri
- Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Riau. (2020). Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau. Retrieved July 9, 2022, from riau.go.id website: https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum
- Direktorat Neraca Produksi. (2016). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015*. Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Neraca Produksi. (2021). *Tinjauan Regional Berdasarkan Kabupaten/Kota 2016-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. (2020). *Kajian Fiskal Regional*. https://doi.org/10.15625/1813-9663/1/4/6706
- Ditjen Pembendaharaan Provinsi Riau. (2020). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2020*. Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Riau.
- Firdaus. (2011). *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif* (Edisi Kedu). Jakarta: Bumi Aksara.
- Firmansyah, & Soejoto. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–6.
- Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivarivat dengan Program SPSS* (Edisi 4). Semarang: Badan Penerbitan Univesitas Diponegoro.
- Hananto. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016). Yogyakarta: Badan Publikasi Universitas Islam Indonesia.
- Iskandar. (2012). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010). Jakarta: Badan Publikasi Universitas Indonesia.
- Kamaroella, & Kutsiyah. (2018). *Isu-isu Strategi Makro Ekonomi*. Surabaya: CV. Zifatama Jawara.
- Karyono, Tusianti, Gunawan, Nugroho, & Clarissa. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Maket. (2021). Population Dynamics and Economic Growth in Kenya. *Hungarian Statistical Review*, 4(2), 18–33. https://doi.org/10.35618/hsr2021.02.en018
- Marlina. (2014). Analisis Derajat Desentralisasi Fisal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Daerah Aceh. *JSEB*, *I*(1).
- Muqorrobin, & Soejoto. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan*

- Ekonomi, 5(3).
- Nguyen, Vo, Ho, & Vo. (2019). Fiscal Decentralisation and Economic Growth Across Provinces: New Evidence from Vietnam Using a Novel Measurement and Approach. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(3), 1–13. https://doi.org/10.3390/jrfm12030143
- Orji, Ogbuabor, Iwuagwu, & Anthony-Orji. (2020). Empirical Analysis of the Impact of Population Increase on the Economic Growth of Africa's Most Populous Country. *Socio-Economic Research Bulletin*, 2(73), 27–45. https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.27-45
- Pane, Sembiring, & Unsa. (2020). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatra Utara. *Jurnal Sekolah PGSD FIP UNIMED*, *4*(2), 172–182. Retrieved from https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/js/article/view/18084
- Pangestika. (2015). Analisis Estimasi Model Regesi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan random Effect Model (REM). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pemerintah Aceh. (2022). Geografis Aceh. Retrieved July 9, 2022, from acehprov.go.id website: http://mirror.acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-aceh.html
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2018). Aspek Geografis. Retrieved July 9, 2022, from babelprov.go.id website: https://babelprov.go.id/profil/aspekgeografis
- Putra, & Hidayat. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Ridzuan, Khalid, Zarin, Ridzuan, Ismail, & Norizan. (2018). The Impact of Foreign Direct Investment, Domestic Investment, Trade Openness And Population on Economic Growth: Evidence from Asean-5 Countries. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(1), 128–143. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i1/3799
- Rodionov, Kudryavtseva, & Skhvediani. (2018). Human Development and Income Inequality as Factors of Regional Economic Growth. *European Research Studies Journal*, 21(2), 323–337.
- Rosdyana, Suhendra, & Pasaribu. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2009-2013. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur&Sipil)*, 6, 123–132. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3357.2881
- Rukmana. (2012). Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 1984-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 27–34.

- Rustan. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3), 284–304. https://doi.org/10.24258/jba.v9i3.124
- Safitri, & Aliasuddin. (2016). Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, *1*(1), 56–65.
- Saputra, & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *16*(2), 185–199. Retrieved from http://eprints.upnyk.ac.id/871/
- Sari, Nasrun, & Putri. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017. *Jurnal Ekonomi*, 8(1), 1–13. https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.9
- Suparmoko. (2016). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sutriani, & Damanik. (2022). Analisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota pematangsiantar. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 38–50.
- Syahputra. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *I*(1), 12–21.
- Umiyati. (2014). Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2), 42–50.
- Utami. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia(IPM), Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113. Retrieved from https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/2303
- Wahyuningsih. (2020). Ekonomi Publik (Edisi 2). Depok: Rajawali Pers.
- Widarjono. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wididarma, & Jember. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal EP Unud*, *10*(7), 2982–3010.
- Woestho, Sulistyowati, & Sari. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 182–191.
- Yenny, & Anwar. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 10(2), 26–31.

https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3181

Yulianita, Susetyo, A.K, & Azwardi. (2017). Human Capital and Economic Convergence in Indonesia: An Empirical Analysis. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 7(7), 439–444.